



Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital dan Internasional: Perlindungan Konsumen Online serta Tantangan Hukum FDI dan Pinjaman Luar Negeri

Faradhina Zahra Putri Ramadhani¹, I Nyoman Budiana², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, Kadek Julia Mahadewi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fahzahra5@gmail.com, budiana@undiknas.ac.id, januarsa.adi@undiknas.ac.id, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid growth of the digital economy and the increasing integration of international economic activities demand regulatory harmonization that ensures legal certainty, fairness, and comprehensive protection for all economic actors. In the digital sphere, the rise of online transactions has intensified potential disputes between consumers and businesses, particularly involving unlawful acts such as product discrepancies, fraud, and breaches of contract. Concurrently, the need for development financing drives governments to utilize international instruments such as Foreign Direct Investment (FDI) and foreign loans, each carrying distinct legal implications for national sovereignty and economic stability. This study aims to analyze the urgency of harmonizing regulations between digital consumer protection frameworks and the legal structures governing international financing, while also examining the legal challenges arising in the implementation of FDI and foreign loans in Indonesia. This research employs a normative juridical method through statutory, case, and literature analyses. The findings indicate that online consumer protection still faces obstacles in law enforcement and consumer awareness, whereas FDI offers long-term benefits but requires strong regulatory certainty, and foreign loans pose fiscal burdens and potential legal clauses that may limit state sovereignty. Therefore, regulatory harmonization is essential to ensure that both digital and international economic ecosystems operate in a balanced, transparent, and sustainable manner.

Keywords: Regulatory harmonization, Digital economy, Online consumer protection, Foreign Direct Investment (FDI), Foreign loans, Legal certainty, Legal challenges.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital dan integrasi ekonomi internasional menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Di satu sisi, maraknya transaksi jual beli online meningkatkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terkait perbuatan melawan hukum seperti ketidaksesuaian produk, penipuan, maupun wanprestasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan

internasional, serta mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam praktik FDI dan pinjaman luar negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen online masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan kesadaran konsumen, sementara FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun memerlukan kepastian regulasi, dan pinjaman luar negeri berisiko menimbulkan beban fiskal serta klausul hukum yang dapat membatasi kedaulatan negara. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem ekonomi digital dan internasional berjalan secara seimbang, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Harmonisasi regulasi, Ekonomi digital, Perlindungan konsumen online, Foreign Direct Investment (FDI), Pinjaman luar negeri, Kepastian hukum, Tantangan hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Integrasi antara aktivitas ekonomi konvensional dan digital menciptakan ekosistem ekonomi baru yang ditandai dengan meningkatnya transaksi e-commerce, perubahan pola konsumsi, serta munculnya berbagai model bisnis berbasis platform. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di masyarakat (Darmawan, 2022). Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti maraknya penipuan online, ketidaksesuaian barang, penyalahgunaan data, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Banyak penelitian menunjukkan bahwa norma yang tertuang dalam UUPK masih berfokus pada transaksi konvensional, sehingga belum mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab platform digital atau marketplace (Hawari et al., 2025). Di sisi lain, transaksi digital yang bersifat lintas wilayah memperumit proses pengawasan dan penyelesaian sengketa. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha online yang tidak jarang sulit dilacak identitas hukumnya.

Sementara itu, globalisasi ekonomi juga meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap arus pembiayaan internasional melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri. FDI dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja (Harianto & Sari, 2021). Namun, keberhasilan FDI sangat ditentukan oleh kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah (Sidabutar et al., 2025). Ketidakpastian hukum atau perubahan regulasi yang tidak terprediksi sering menjadi hambatan utama bagi investor asing. Penelitian menunjukkan bahwa investor menempatkan aspek stabilitas regulasi

sebagai faktor utama sebelum menanamkan modal mereka di negara berkembang (Manalu, 2024).

Di sisi lain, pinjaman luar negeri tetap menjadi instrumen penting dalam membiayai pembangunan nasional, terutama proyek infrastruktur. Namun, instrumen ini mengandung risiko seperti meningkatnya beban fiskal, ketergantungan terhadap ekonomi global, serta kemungkinan adanya klausul hukum yang membatasi kedaulatan negara (Kusumawati et al., 2024). Dalam banyak kasus, perjanjian pinjaman luar negeri mewajibkan penggunaan hukum asing atau forum arbitrase internasional, yang dapat menempatkan negara dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika terjadi sengketa (Lumbantobing et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu perlindungan konsumen online maupun isu pembiayaan internasional secara terpisah. Misalnya, Fadillah et al. (2025) membahas peran valuta asing dalam sistem pembayaran internasional, sementara Nyamando & Andrian (2025) membahas faktor-faktor yang memengaruhi FDI di Indonesia. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua isu tersebut dalam satu analisis yang komprehensif. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (research gap) terkait bagaimana harmonisasi regulasi dapat membantu menciptakan ekosistem hukum yang stabil dan adaptif di tengah perkembangan ekonomi digital dan global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan internasional. Fokus penelitian meliputi: (1) dinamika perlindungan konsumen dalam transaksi online, (2) tantangan hukum FDI dan pinjaman luar negeri, serta (3) kebutuhan harmonisasi regulasi sebagai upaya memperkuat sistem hukum nasional yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang (Zed et al., 2025). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum ekonomi digital dan internasional di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada harmonisasi regulasi ekonomi digital dan internasional, perlindungan konsumen online, serta tantangan hukum dalam Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang seluruhnya berkaitan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk mengkaji regulasi terkait perlindungan konsumen online, transaksi elektronik, FDI, dan pinjaman luar negeri. (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk memahami konsep hukum ekonomi digital, harmonisasi regulasi, dan prinsip kepastian hukum. (3) Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan menelaah putusan pengadilan terkait sengketa konsumen online dan permasalahan investasi atau pinjaman luar negeri. (4)

Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) untuk menilai perbedaan karakteristik hukum antara FDI dan pinjaman luar negeri.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan dan putusan), sekunder (buku dan jurnal), dan tersier (kamus/ensiklopedia). Seluruh bahan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai harmonisasi regulasi ekonomi digital dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan berbagai tantangan regulasi. Maraknya transaksi e-commerce meningkatkan potensi kerugian konsumen akibat praktik penipuan, penyalahgunaan data pribadi, misinformasi produk, serta ketidaksesuaian barang dan jasa. Meski UUPK telah berlaku sejak lama, banyak ketentuan yang belum relevan dengan mekanisme transaksi digital modern. Penelitian Hawari et al. (2025) menunjukkan bahwa kompleksitas transaksi online tidak dapat ditangani secara efektif oleh regulasi konvensional, khususnya ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang beroperasi secara maya.

Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan tanggung jawab marketplace. Banyak platform digital berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga tidak menganggap diri bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Penelitian Fadillah et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas sistem transaksi digital memerlukan kejelasan peran semua pihak, termasuk platform sebagai penyedia layanan. Kelemahan lain terdapat pada minimnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan digital yang bersifat lintas wilayah. Banyak kasus penipuan tidak dapat diselesaikan karena pelaku tidak dapat dilacak, atau pelaku berada di daerah yang berbeda dengan konsumen.

Putusan pengadilan terkait sengketa e-commerce masih sangat terbatas, dan banyak konsumen memilih tidak melanjutkan perkara karena prosesnya rumit. Literasi digital masyarakat juga menjadi penghambat dalam penegakan hak-hak konsumen (Darmawan, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar perlindungan konsumen di era digital lebih optimal.

Foreign Direct Investment (FDI) dan Tantangan Kepastian Hukum

FDI merupakan sumber pembiayaan penting bagi Indonesia. Namun, faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan investasi adalah kepastian hukum, stabilitas politik, dan konsistensi kebijakan. Penelitian Sidabutar et al. (2025) menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi investor asing. Perubahan mendadak dalam regulasi investasi, perizinan usaha, atau tata ruang sering menimbulkan ketidakpastian yang berdampak langsung pada keputusan investasi.

Masalah lain muncul dari tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, perbedaan kebijakan dalam perizinan dapat menghambat

investor meskipun telah memenuhi persyaratan di tingkat pusat (Manalu, 2024). Situasi ini diperburuk oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa investasi sering berakhir pada arbitrase internasional, yang dapat menyebabkan beban finansial besar bagi negara ketika kalah dalam kasus ISDS (Torina, 2025).

Investor biasanya menilai negara dengan regulasi stabil sebagai destinasi investasi yang aman. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan perizinan, serta memperkuat transparansi untuk meningkatkan daya saing di mata investor global.

Pinjaman Luar Negeri: Manfaat dan Risiko Hukum

Pinjaman luar negeri menjadi salah satu instrumen pendanaan pembangunan yang banyak digunakan pemerintah. Instrumen ini ideal untuk proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan transportasi. Namun, risiko yang menyertainya cukup besar. Penelitian Kusumawati et al. (2024) menegaskan bahwa pinjaman luar negeri dapat meningkatkan beban fiskal dan memicu ketergantungan ekonomi jika tidak dikelola secara hati-hati.

Selain risiko fiskal, terdapat risiko hukum yang harus diperhatikan. Banyak perjanjian pinjaman mengandung klausul penggunaan hukum asing, arbitrase internasional, atau kewajiban tertentu yang membatasi ruang gerak kebijakan negara (Lumbantobing et al., 2025). Hal ini dapat berpotensi mengurangi kedaulatan Indonesia. Fluktuasi ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga internasional, juga dapat meningkatkan biaya pembayaran utang secara signifikan (Yunus et al., 2021).

Oleh karena itu, tata kelola pinjaman luar negeri harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Evaluasi yang komprehensif perlu dilakukan sebelum negara mengambil pinjaman baru untuk menghindari risiko jangka panjang yang dapat membebani generasi mendatang.

Keterkaitan antara Ekonomi Digital, FDI, dan Pinjaman Luar Negeri

Ekonomi digital dan pembiayaan internasional memiliki hubungan yang erat. Pengembangan ekosistem digital membutuhkan investasi besar, baik dari investor asing maupun melalui pinjaman luar negeri. Banyak proyek transformasi digital, seperti pembangunan pusat data, infrastruktur broadband, dan sistem keamanan siber, bergantung pada dukungan pembiayaan internasional.

Namun, ketidakstabilan regulasi di sektor digital dapat menghambat minat investor untuk menanamkan modal di sektor tersebut. Sebaliknya, pinjaman luar negeri untuk proyek digital dapat menghadapi kendala jika regulasi teknologi informasi dan perlindungan data tidak harmonis. Zed et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi regulasi untuk mencegah ketidakseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan stabilitas kebijakan digital.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pembiayaan internasional, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil, aman, dan berkelanjutan.

Harmonisasi Regulasi sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Nasional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi lintas sektor merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan digital. Ada beberapa implikasi penting:

1. Perlindungan konsumen digital harus diperkuat melalui revisi peraturan yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha digital.
2. Kebijakan penanaman modal harus diselaraskan agar investor asing dapat berinvestasi dengan kepastian hukum yang memadai.
3. Tata kelola pinjaman luar negeri perlu diperketat untuk menghindari risiko terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.
4. Integrasi regulasi antara sektor ekonomi digital dan pembiayaan internasional menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi.

Dengan harmonisasi regulasi yang baik, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekonomi digital global serta meningkatkan daya tarik sebagai destinasi investasi internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital dan peningkatan integrasi pembiayaan internasional melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri menghadirkan tantangan hukum yang signifikan bagi sistem hukum Indonesia. Pada konteks ekonomi digital, perlindungan konsumen dalam transaksi online masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital, keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, dalam konteks pembiayaan internasional, FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun sangat bergantung pada stabilitas regulasi dan kepastian hukum, sedangkan pinjaman luar negeri membawa risiko beban fiskal dan potensi klausul perjanjian yang dapat mengurangi ruang kebijakan negara.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kedua sektor tersebut membutuhkan kerangka regulasi yang harmonis, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika global. Ketidakselarasan aturan antara sektor digital dan sektor pembiayaan internasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, serta melemahkan perlindungan konsumen. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital dan global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada para dosen

pembimbing dan pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, wawasan, dan masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penghargaan juga penulis berikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional atas fasilitas, dukungan akademik, serta lingkungan penelitian yang kondusif. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan pihak lain yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, diskusi, serta penyempurnaan naskah ini.

Akhirnya, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian harmonisasi regulasi ekonomi digital dan internasional. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi penguatan sistem hukum dan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, Malikul Hafiz, Fani Ramadhani and Nur Azizah, 'Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam' (2020) 1(1) *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 62
<<https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/1924>>
- Andriani, Heidy and Suyatno, 'Peran Hukum Kontrak Dalam Investasi Asing Langsung: Analisis Kasus Di Negara Berkembang' (2024) 1(2) *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1170
<<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/145>>
- Bagraff, Halida Achmad, 'Determinan Foreign Direct Investment Di Indonesia Ditinjau Dari Paradigma Fiqh Muamalah' [2022] *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya* 5
- Choirunnisa, Berlianityaputri Ramadhanty and Thifal Anjani, 'Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Letter Of Credit Sebagai Instrumen Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor-Impor Di Indonesia' (2024) 6(1) *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1
<<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/848>>
- Darmawan, Indra, 'Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia' (2022) 15(2) *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi* 57 <<https://ejournal.usd.ac.id/index.php/JPEA/article/view/5077>>
- Fadillah et al, 'Valuta Asing: Peran Dan Fungsinya Dalam Sistem Pembayaran Internasional' (2025) 4(2) *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 136
<<https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/5165>>
- Firdaus, Erni Wati and Putri Amalia, 'Analisis Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi' (2025) 1(3) *JOEDER: Journal of Economics Development Research* 91
<<https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder/article/view/144>>
- Harianto, Samuel Kharis and Dyah Wulan Sari, 'Dampak Spillover Penanaman Modal Asing Terhadap Produktivitas Industri Manufaktur Medium-High Technology Di Indonesia' (2021) 12(1) *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 1
<<https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/2138>>

-
- Haryanto, Irfan and Rani Apriani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment)' (2025) 11(2) *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 98
<<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9815>>
- Hawari, Naufal et al, 'Peran Valuta Asing Dan Hukum Internasional Dalam Mendukung Perdagangan Internasional' (2025) 18(02) *Jurnal Serambi Hukum* 331 <<http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1327>>
- Ismiralda, Riris, 'Peran Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional' (2025) 1(7) *Circle Archive* 1 <<https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/440>>
- Jaya, Indah Dwi et al, 'Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global' (2025) 2(5) *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 41 <<https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/21680>>
- Kalangi, Meyti Hanna Ester, Gugus Wijonarko and Indriana Kristiawati, *Inter Multimoda Freight Forwarding* (Scopindo Media Pustaka, 2024)
- Kusumawati, Diyah Ayu et al, 'Utang Dan Perekonomian Indonesia' (2024) 1(10) *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 6689
<<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/17999>>
- Lumbantobing, Marianna Natalia, Patricia Audrey Ruslijanto and Hikmatul Ula, 'Tinjauan Perbandingan Pengakuan Putusan Asing Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia' (2025) 2(2) *RechtJiva* 376
<<https://rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/1454>>
- Mahadiansar, Mahadiansar et al, 'Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019' (2021) 5(1) *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 65 <<http://repositori.umrah.ac.id/5324/>>
- Manalu, Fredy, 'Keterkaitan Antara Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Pembangunan Ekonomi' (2024) 1(5) *Ekonomi* 1 <<http://www.circle-archive.com/index.php/carc/article/view/191>>
- Margaretha, Viona, 'Reformasi Regulasi Untuk Mempermuda Proses Berusaha Di Indonesia' in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Investasi Berkelanjutan (SENHIB)* (2025) 17
<<https://proceeding.unilak.ac.id/index.php/senhib/article/view/41>>
- Maulidi, Naufal Nur and Rachmad Kresna Sakti, 'Pengaruh Perdagangan Internasional Dan FDI Indonesia Dengan Amerika, China, Dan Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2024) 3(1) *JDESS: Journal of Development Economic and Social Studies* 305
- Nirawati, Lia et al, 'Investasi Internasional' (2023) 4(6) *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 1608
<<https://journal.laaroiba.com/index.php/elmal/article/view/3040>>
- Nyamando, Yasidik and Thomas Andrian, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Foreign Direct Investment Tingkat Provinsi Di Indonesia' (2025) 3(3) *EFEBE: E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship* 540 <<https://efebe.feb.unila.ac.id/index.php/efebe/article/view/274>>
-

-
- Pramesti, Kartika Marlina Sulistiara, Royyan Quwais Al-Qarni and Sarpini, 'Pendekatan Moneter Dalam Analisis Neraca Pembayaran Internasional: Teori Dan Aplikasinya' (2024) 1(4) *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 230
<<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/3326>>
- Puspa, Rani et al, 'Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Terhadap Persyaratan Agunan Pinjaman' (2021) 17(2) *JEM: Jurnal Ekonomi Modernisasi* 95
- Putri, Angelica Maharani, 'Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2024) 1(2) *PIPS: Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* 85
<<https://www.journal-iasssf.com/index.php/PIPS/article/view/850>>
- Putri, Shabiha Elena and Welly Gosal, 'Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) Di Indonesia' (2025) 4(3) *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4170
<<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/8735>>
- Rahmawati, Wulan, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (FDI) Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2000-2019' (2022) 1(4) *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 60
<<https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/193>>
- Ramadhany, Elyasa, Adya Hermawati and Gunarianto, 'Analisis Pengaruh Return On Assets Dan Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio Dengan Effective Tax Rate Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia)' (2025) 4(3) *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 327
<<https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/10512>>
- Rauf, Deddy Ibrahim, 'Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2024) 2(1) *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi* 107
<<https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/341>>
- Rezki, Ririn Martini, Yeniwati and Mike Triani, 'Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Investasi Asing Langsung (Study Kasus China Indonesia)' (2017) 6(2) *Jurnal Ecosains* 103
- Siburian, Binton, Sugi Apriyanto and Parlin Tumpal Sinaga, 'Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2016-2020' (2022) 1(1) *JEKMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 56
<<https://journal.binainternusa.org/index.php/jekma/article/view/30>>
- Sidabutar, Amabel Yulia et al, 'Konsistensi Dan Kepastian Kebijakan Investasi Di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap Keputusan Investor' (2025) 11(8) *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 14
<<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10788>>
- Soeryono, S, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1984)

-
- Subagja, Agus Dedi, 'Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import (Studi Kasus Pada PT. San San Saudaratex Jaya)' (2020) 2(1) *IJD: International Journal of Demos* 78
- Sutrisno, Hadi, 'Analisis Kebijakan Pengelolaan Defisit Anggaran Melalui Utang Pemerintah' (2022) 9(1) *eBA Journal* 71
<<https://ejournal.undar.or.id/index.php/eBA/article/view/195>>
- Thalib, Salim Saleh, 'Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing Di Indonesia' (2024) 5(1) *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 787
<<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3148>>
- Tobing, Rainer Prakuso, Tarcisius Sunaryo and Ketut Silvanita Mangani, 'Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional' (2021) 2(I) *Jurnal Manajemen Risiko* 79
- Torina, Amalia Salsabila, 'Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Kegiatan Investasi Asing' (2025) 5(3) *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1704 <<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3657>>
- Wage, Sunarto, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia' (2020) 5(1) *Jurnal Akuntansi Bareleng* 22
- Yahya, Alvin and Yulfan Arif Nurohman, *Lalulintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri* (Gerbang Media Aksara, 2022)
- Yanti, Dewi et al, 'Mekanisme Pengelolaan Utang Negara Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional' (2025) 2(1) *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 96
<<https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/97>>
- Yunus, Rita et al, 'Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2021) 4(1) *YUME: Journal of Management* 151
- Zed, Etty Zuliawati, Pepen Komarudin and Nanci Margaret Teresia Napitupulu, *Ekonomi Internasional* (Takaza Innovatix Labs, 2025)
- Bahauddin, Ahmad Agus, 'Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung, 2021)
- Syaifudin, Mochammad Ariska, 'Implikasi Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Perkapita Di Indonesia Pada Tahun 1991-2023 Dalam Perspektif Prinsip Distribusi Kekayaan Islam' (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024) <<https://etheses.iainkediri.ac.id/15071/>>